



Judul : Jaga stabilitas politik,perkuat demokrasi berbasis Pancasila
Tanggal : Kamis, 14 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jaga Stabilitas Politik

Perkuat Demokrasi Berbasis Pancasila

ANGGOTA Badan Pengkajian MPR Maman Imanul Haq menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia hanya akan kuat jika berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Tanpa itu, demokrasi berisiko melahirkan tirani atau kekuasaan sewenang-wenang.

"Demokrasi memang bukan sistem terbaik, tapi untuk saat ini adalah cara paling tepat dalam mengelola pembagian kekuasaan," ujar Maman dalam diskusi bertema Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila yang digelar di Gedung DPR, Jakarta.

Dia mengacu pada Pasal I Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjadi fondasi utama demokrasi Indonesia.

"Terlebih Indonesia memiliki kekuatan perekat sosial yang unik, yaitu tradisi gotong royong dan kebersamaan dalam lintas perbedaan politik," tambahnya.

Maman juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menghidupkan kembali semangat musyawarah mufakat sebagai puncak demokrasi Indonesia. Selain itu, demokrasi memerlukan pendidikan politik berkelanjutan, penguatan kebebasan sipil, dan literasi digital untuk menangkal hoax.

"Pentingnya literasi digital untuk meminimalisir hoax. Peran DPR dan MPR dalam sosialisasi Pancasila sebagai

pengikat entitas bangsa Indonesia," ujar Maman.

Sebagai contoh, Maman menyinggung viralnya video palsu ikan paus memakan pelatiknya yang menunjukkan rendahnya literasi digital masyarakat.

Dia juga mengkritisi sejumlah penyimpangan dalam praktik demokrasi, seperti manipulasi kuota haji dan kenaikan PBB-P2 di Pati hingga 250 persen yang memicu gelombang protes rakyat.

Meski demikian, Maman optimistis terhadap kondisi demokrasi Indonesia. Dia menyebut indeks demokrasi nasional saat ini mencapai 79,51 poin, dengan partisipasi pemilih hingga 75 persen, melampaui negara maju seperti Jepang.

"Kita harus memastikan demokrasi tidak hanya stabil, tetapi juga membawa kemaslahatan, kemakmuran dan keadilan," tandas Anggota Komisi VIII DPR ini.

Dalam forum yang sama, anggota DPD Lia Istifhama mengatakan, demokrasi tidak boleh dimaknai sekadar seba-

gai pemilu lima tahunan.

"Demokrasi bukan soal prosedur, tapi wadah musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terkandung dalam sila keempat Pancasila," katanya.

Dia juga menyoroti pentingnya hubungan emosional antara pemimpin dan rakyat. Respons cepat Presiden Prabowo dalam menghadapi isu publik menunjukkan kualitas komunikasi yang membangun kepercayaan publik. ■ TRF